

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan partai politik di negara demokrasi seperti Indonesia ini, dari masa penjajahan yaitu masa kolonial sampai dengan masa reformasi mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Setelah reformasi banyak partai baru bermunculan. Partai politik mempunyai andil sangat besar dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui partai politik aspirasi masyarakat bisa tersalurkan, masyarakat bebas dalam menentukan partai politik, baik menjadi kader partai tersebut ataupun sebagai simpatisan partai yang bercorak agamis maupun nasionalis. Partai politik merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Tanpa adanya partai politik, kehidupan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

Untuk pelaksanaan demokrasi paling tidak diperlukan peranan politik membentuk sikap demokrasi kalangan warga negara agar tercapai suatu kreativitas warga sebagai basis sumber daya politik, pemindahan atau pengoperan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai moral. Warisan benda-benda budaya, keyakinan, agama yang dianut, pengetahuan dan teknologi lain-lain. Tingginya tingkat pendidikan dan kebudayaan rakyat akan menjadi suatu barometer bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan khusus negara Indonesia. Sebab itu negara, khusus negara demokrasi, sangatlah berkepentingan dengan pendidikan seluruh warga negaranya demi menanamkan

norma-norma demokrasi dan ikut bertanggung jawab atas diterapkannya asas demokrasi.

Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang sekarang telah di ubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Partai politik di definisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela perjuangan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ramlan subekti (1992:114) mendefinisikan partai politik ialah suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang di satukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Partai politik seharusnya melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga dapat menjadikan suatu negara yang demokratis, tetapi pada kenyataannya tidak semua fungsi tersebut telah dilaksanakan oleh partai-partai politik yang ada. Mengingat fungsi partai politik yang begitu penting, sering bahkan keberadaan kinerjanya merupakan ukuran mutlak baga. Dimana demokrasi berkembang bagi suatu negara. Meskipun ia bukan merupakan pelaksana dan suatu pemerintahan, namun keberdaanya akan mempengaruhi bagaimana dan arah mana pelaksanaan pemerintah dijalankan (Payerli, 2017: 53).

Adapun permasalahan dalam mewujudkan pemilu di Indonesia yang Demokratis yaitu:

**Tabel 1.1 Permasalahan Pemilu Demokratis di Indonesia**

No	Permasalahan	Dilakukan Oleh
1	<i>Money Politik</i> dan Transaksi Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan sendiri oleh calon Kepala Daerah</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim Sukses</li> <li>c. Dilakukan Melalui Tokoh Masyarakat</li> </ul>
2	Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan fasilitas daerah oleh calon inkumben. Bawaslu menemukan sejumlah alat peraga (baliho, sepanduk) yang di pasang calon inkumben untuk mempromosikan dirinya, bukan program daerahnya. Ini jelas melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 2015 P Pasal 71 Ayat 2.</li> <li>b. Keterlibatan dan mobilisasi PNS saat deklarsi atau pendaftaran berlangsung di KPU daerah.</li> <li>c. Adanya politik uang atau mahar dalam pencalonan kepala daerah.</li> </ul>
3	Partisipasi politik masyarakat	Rendahnya tingkat partisipasi politik (pemilih) dalam pilkada kota Medan hanya 27%. Banyak faktor yang menyebabkan minimnya animo masyarakat dalam pilkada serentak tersebut, mulai dari persoalan teknis sampai alasan Idiologis.

(Ratinah Solehah dan Siti Witianti, 2017 : 18)

Permasalahan penyelenggaraan pemilu dalam pilkada serentak 2015 diberbagai daerah di sebabkan oleh belum maksimalnya partai politik membangun nilai-nilai Demokrasi. Baik Demokrasi kepada masyarakat itu sendiri bahkan kepada kader-kader partai. Terjadi *money politik* oleh kader-kader partai untuk memenangkan kontestasi politik, bahkan partai politik itu sendiri melakukan pelanggaran. Seperti halnya dengan adanya mahar-mahar politik dalam pencalonan kepala daerah sehingga calon kepala daerah yang tidak mempunyai uang tidak mendapatkan rekomendasi partai politik untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal tersebut mengakibatkan pemenang dalam kontestasi Pilkada Serentak belum sesuai yang diharapkan karena hanya mengandalkan uang semata dan janji-janji disaat kampanye. Belum lagi masalah masih rendahnya angka paratisipasi masyarkat. Kita bisa ambil contoh dalam pemilu di Kota Medan hanya 27% (Ratinah Solehah dan Siti Witianti, 2017: 23). Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan walikota, hal ini disebabkan belum maksimalnya partai politik memberikan nilai-nilai demokrasi dengan baik kepada masyarakat sehingga angka partisipasi masih rendah.

Masyarakat memerlukan wawasan terhadap nilai-nilai Demokrasi sehingga terbentuklah masyarakat yang mampu berperan dengan baik dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran partai politik sangat diharapkan karena partai politik bersentuhan langsung terhadap masyarakat dan menjadi jembatan masyarakat untuk memberikan aspirasi dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Di Kabupaten Banyumas pengetahuan mengenai demokrasi juga bermacam-macam bisa kita lihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Pemahaman Masyarakat Banyumas Tentang Demokrasi

No	Pemahaman Demokrasi	Jumlah
1.	Dari Rakyat Untuk Rakyat	24%
2.	Kebebasan Berekpresia	20%
3.	Pemungutan Suara	5,3%
4.	Tidak Tahu	16,8%
5.	Tidak Menjawab	3,8%

(Chusmeru dan Edi Santoso, 2012: 3)

Pemahaman tentang demokrasi di Kabupaten Banyumas bermacam-macam. Seperti dari rakyat untuk rakyat, kebebasan berekpresia, pemungutan suara, tidak tahu serta tidak menjawab. Masih rendahnya tingkat pemahaman mengenai demokrasi. Dengan demikian peran partai politik di Kabupaten Banyumas perlu memberikan wawasan mengenai pengetahuan demokrasi yang baik terhadap masyarakat Banyumas sehingga masyarakat mengetahui arti demokrasi yang sesungguhnya serta mampu berperan aktif dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Banyumas.

Partai Politik di Indonesia ada yang berideologi Nasionalis dan agamis diantaranya yaitu Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang berideologi nasionalis dan Partai Amanat Nasional (PAN). Peneliti menggunakan objek partai Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) karena partai PDIP merupakan partai yang dianggap memiliki simpatisan terbanyak di kabupaten Banyumas sedangkan partai PAN karena partai yang dianggap berlandaskan agamis sehingga mewakili simpatisan mayoritas muslim

di Banyumas. Setiap partai politik berkewajiban membangun nilai-nilai demokrasi begitu juga dengan partai politik di Kabupaten Banyumas, masyarakat Banyumas yang akan mengikuti proses demokrasi yaitu proses pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, partai politik berkewajiban memberikan pendidikan nilai-nilai demokrasi sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan dan kesadaran mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara. Dengan adanya pendidikan nilai-nilai demokrasi proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten menjadi aman, nyaman, dan damai serta terpilihnya Kepala Daerah yang berkualitas. Peneliti memilih obyek penelitian berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pendidikan nilai-nilai demokrasi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Partai Politik dalam Membangun Nilai-nilai Demokrasi Bagi Masyarakat Banyumas (Study Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Banyumas”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Realitas yang dilakukan partai politik PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana kegiatan pendukung partai PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Banyumas?

3. Bagaimana dinamika partai PDIP dan PAN dalam membangun nilai-nilai pendidikan demokrasi pada masyarakat Banyumas?
4. Bagaimana tantangan atau hambatan partai PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Banyumas?
5. Bagaimana Solusi PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi yang baik di masyarakat Banyumas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui realita PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Kabupaten Banyumas.
2. Menegetahui kegiatan pendukung partai PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Banyumas.
3. Mengetahui dinamika partai PDIP dan PAN dalam membangun nilai-nilai pendidikan demokrasi pada masyarakat Banyumas.
4. Mengetahui tantangan atau hambatan partai PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Banyumas.
5. Mengetahui solusi PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi yang baik pada masyarakat Banyumas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat untuk menegtahui peran partai politik dalam memberikan pendidikan Demokrasi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai politik melakukan pendidikan demokrasi bagi pengurus, kader, simpatisan, maupun masyarakat umum.

### b. Bagi masyarakat

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik yang ada, sehingga dengan pengetahuan politik tersebut masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang pada umumnya masyarakat akan lebih aktif dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilu, dan masuk partai politik.

### c. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pengalaman langsung mengenai pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh partai politik dalam hal ini Partai Demokrasi Perjuangan dan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Banyumas